

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Istilah "kajian pustaka" sering digunakan dalam bidang akademik dan penelitian untuk merujuk pada tinjauan atau penelaahan berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk mendapatkan informasi terbaru dan akurat tentang topik yang akan diteliti.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mendapatkan referensi dan pembandingan dari temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Hal ini juga berguna untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, dan juga digunakan untuk membantu penelitian yang akan datang untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan keaslian penelitian. Sebagai bahan pertimbangan penelitian, Peneliti memilih tiga penelitian terdahulu yang diajukan sebagai acuan dalam penyusunan usulan penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian terdahulu Farah Diana, Zahratul Idami dan Wais Alqarni

Penelitian tersebut berjudul Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan Di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Aceh Besar di karenakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan tidak dijalankan dengan tegas sehingga tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Hambatan dalam proses implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di antaranya waktu dan sumber daya yang tidak tersedia secara memadai, jarang ada kesepakatan di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, kemudian sikap responsif para implementor. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga berupaya membuat program-program untuk mendukung implementasi kebijakan alih fungsi seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan fasilitas dan juga melakukan program cetak sawah.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif metode deskriptif. Juga terdapat persamaan pada teknik analisis yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Hoogerwerf sedangkan penelitian diatas menggunakan teori implementasi kebijakan menurut (Merilee S. Grindle). Adapun perbedaan pada lokus penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karawang sedangkan penelitian diatas melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Besar.

2. Penelitian terdahulu Ahmad Syawal, H.Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari

Penelitian tersebut berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar. Pada tahun 2021 Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Makassar tidak memiliki Peraturan Daerah (PERDA) khusus yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Sementara adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Makassar yang menjelaskan ada kawasan peruntukan pertanian di Kota Makassar sebagai kawasan peruntukan pertanian, dijelaskan pada pasal 72 ayat (2) Kawasan peruntukan pertanian pangan ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 168,79 hektar tersebut, hanya sebagai rencana atau sebagai kawasan pertanian budidaya yang masih dalam tahap rencana, yang bisa kapanpun dialih fungsikan atau dikelola ke hal yang lain. Pemerintah Kota Makassar masih ditahap proses identifikasi kepemilik lahan pertanian yang ada di Kota Makassar dan masih di tahap penganggaran serta penyusunan rancangan pengadaan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar yang akan dimasukkan dalam persiapan peraturan daerah baru Kota Makassar.

Persamaan peneliatian diatas dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan berupa kualitatif. Dan juga

terdapat persamaan pada teknik analisis yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu metode penelitian yang berbeda, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif sedangkan penelitian diatas menggunakan metode penelitian studi kasus adapun perbedaan teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Hoogerwerf sedangkan penelitian diatas menggunakan teori implentasi kebijakan menurut Soren C. Winter. Kemudian terdapat perbedaan pada lokus penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karawang sedangkan penelitian diatas melakukan penelitian di Kota Makassar.

3. Penelitian terdahulu Ramlan Mahesa

Penelitian tersebut berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yaitu untuk komunikasi belum berjalan maksimal dan terdapat miskomunikasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian dengan masyarakat karena komunikasi yang dilakukan kurang konsisten. Kemudian untuk sumber daya manusia yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian sudah memadai dikarenakan proses yang selektif oleh BKSDM sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas. Kemudian terdapat fasilitas fisik yang memadai, hanya perlu menambahkan, memperbaiki, dan merawat fasilitas yang sudah ada. Kemudian disposisi atau sikap para pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu kurang maksimal karena kurangnya pengawasan terhadap pegawai sehingga berdampak pada kecenderungan lupa dalam tugas pokoknya yang sudah disepakati diawal. Kemudian kurang selektif dalam proses pembagian kerja sehingga dalam penerapannya berjalan namun tidak maksimal dan perlu adanya fasilitas untuk menunjang proses transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui informasi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian. Kemudian struktur birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sudah berjalan baik dan sesuai dengan Standar Operating Procedures (SOP).

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif dan metode penelitian berupa deskriptif. Dan juga terdapat persamaan pada teknik analisis yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Hoogerwerf sedangkan penelitian diatas menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Adapun perbedaan dari penelitian diatas

dengan penelitian ini yaitu terdapat perbedaan pada lokus penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karawang sedangkan penelitian diatas melakukan penelitian di Kabupaten Indramayu.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Farah Diana, Zahratul Idami, Wais Alqarni	Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan Di Kabupaten Aceh Besar	Teori Implementasi Kebijakan menurut (Merilee S. Grindle)	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
2.	Ahmad Syawal, H.Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Makassar	Teori Implementasi Kebijakan menurut (Soren C. Winter)	Kualitatif	Studi Kasus	Wawancara, Observasi dan dokumentasi
3.	Ramlan Mahesa	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Indramayu	Teori Implementasi Kebijakan menurut (George C. Edward III)	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara, Observasi dan dokumentasi

2.1.2 Konsep dan Teori

2.1.2.1 Kajian Administrasi

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya.

Administrasi adalah kegiatan yang menduduki kedudukan sentral di dalam pembinaan dan pengembangan pada setiap kegiatan kerjasama sekelompok manusia, dalam bidang pendidikan juga harus ada administrasi yang mampu mengembangkan dan mencapai tujuan yang telah disepakati.

Menurut J.Wajong (1962), kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tatausaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan.

Sedangkan menurut Reksohadiprawiro (1984), administrasi berarti tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.

Menurut Purwaningdyah dan kawan-kawan (2014:1.5) Administrasi secara sempit di rangkum menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Korespondensi* atau surat-menyurat yaitu, rangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari

penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai kepada pihak yang dituju.

2. Ekspedisi, yaitu aktivitas mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima.
3. Pengarsipan, yaitu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dan cepat ditemukan setiap diperlukan.

Administrasi secara luas, berasal dari bahasa Inggris "*Administrastion*", yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P.Siagian, 1973).

Adapun 5 ciri administrasi menurut Purwaningdyah dan kawan-kawan (2014:1.6) yaitu:

1. Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama formal dan informal dibentuk karena pemuasan kebutuhan, kedekatan dan daya tarik, tujuan kelompok, dan alasan ekonomi.
3. Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Menurut Leonard D. White, (dalam Inu Kencana 2003:4) memberikan definisi bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya.

Menurut H.A Simon, (dalam Inu Kencana 2003: 3) memberikan definisi bahwa administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Menurut H.Newman, (dalam Soewarno Handyaningrat 1980:2) mengemukakan bahwa administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Pendapat para ahli menunjukan administrasi adalah suatu kegiatan proses, terutama mengenai cara-cara, sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi juga dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan pengarahan sumber daya manusia, tenaga kerja, dan materi untuk mencapai tujuan yang disepakati.

2.1.2.2 Kajian Administrasi Publik

Administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

Administrasi publik adalah salah satu cabang yang berfungsi sebagai alat untuk menjalankan tujuan pemerintah dalam membangun misi untuk memberikan pelayanan publik. Selain itu, administrasi publik terkait dengan administrasi pembangunan, tujuan negara, peraturan dan kebijakan publik, serta etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Secara tata bahasa, kata administrasi dan publik membentuk istilah administrasi, yang berarti bahwa administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau kolaborasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara publik dapat berarti negara, warga negara, atau masyarakat.

Menurut Dimock dan Fox (2019:6), administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen.

Menurut George J. Gordon (dalam Intan 2017:2) administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Barton dan Chappel (dalam Wisnu & kawan-kawan 2015:3) melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Starling (dalam Wisnu & kawan-kawan 2015:3) melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.

Nigro (dalam Wisnu & kawan-kawan 2015:3) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, eksekutif

mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian, Keban (2008) menyebutkan beberapa makna penting yang harus diingat berkaitan dengan hakekat administrasi publik, yaitu:

1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif.
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik.
3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah.
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tetapi ia *overlapping* (tumpang tindih) dengan administrasi swasta.

Menurut L D White, (1955:1 dalam intan 2017:2) administrasi publik terdiri atas semua operasi yang bertujuan guna memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik merupakan penerapan hukum secara terperinci dan sistematis. Bisa juga dikatakan bahwa administrasi publik tidak lain merupakan kebijakan, praktik, aturan dan regulasi, serta lain sebagainya.

Dengan begitu, administrasi publik bisa diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Perlu diketahui bahwa administrasi publik seperti halnya dengan administrasi lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum.

2.1.2.3 Kajian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan azas yang dijadikan garis besar dari dasar sebuah masalah. Menjadi sebuah rencana di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan, kepemimpinan dan cara dalam bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam bertindak bagi pengambilan sebuah keputusan.

Seperti yang dinyatakan oleh Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam suatu masyarakat.

2.1.2.4 Kajian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu yang kompleks dan memang masih menjadi persoalan disemua daerah dan bahkan negara yang paling maju sekalipun. Fenomena dimana implementasi kebijakan itu tidak mudah bukan khas negara

berkembang atau negara yang mulai menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik seperti Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena di negara maju seperti Amerika Serikat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan.

Bahkan lebih dari itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut.

Luankali (2007) berpendapat bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak

nyata pada masyarakat atas kegiatan-kegiatan program yang sedang atau akan dilaksanakan.

Menurut Aliah dalam buku *Dinamika Kebijakan Publik* Yaya Mulyana A.Aziz (2022:17) Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.

Dalam perspektif aktivitas implementasi kebijakan Jones (1994: 20), menyampaikan bahwa tiga macam aktivitas utama, antara lain :

1. Organisasi; Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode untuk menerapkan suatu kebijakan.
2. Interpretasi; Terjemahan bahasa (sering terkandung dalam undang-undang) menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan layak.
3. Aplikasi; Penyediaan layanan rutin, pembayaran, atau lainnya menyepakati tujuan instrument.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik terjadi karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahapan-tahapan (Awang, 2010).

2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan masalah mengenai implementasi kebijakan alih fungsi lahan pada kementerian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional di kabupaten karawang. Yang dimana kebijakan dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum berjalan dengan efektif karna masih terjadinya masalah ketidak sesuaian antara harapan masyarakat yang tidak ingin di alih fungsi lahankan untuk lahan yang masih produktif. Tetapi yang terjadi di kabupaten karawang ini lahan yang masih produktif pun masih di alih fungsi lahankan untuk suatu perumahan subsidi.

Untuk mempermudah pemecahan masalah laporan dalam suatu penelitian ini memerlukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran, yaitu berupa teori dari para ahli. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Hoogerwerf (1983:166173 dalam Alexander phuk tjilen 2019:139) yang dijadikan pedoman dan dasar penelitian.

Menurut Hoogerwerf (1983:166173 dalam Alexander phuk tjilen 2019:139), ada 4 syarat untuk keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Isi Kebijakan

Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kebijakan itu jelas baik mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai cukup rinci, tersedianya sarana dan penetapan prioritas atau program kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dapat gagal apabila isi kebijakan itu sifatnya samar-samar, kabur, tidak terinci baik sarana atau prioritas, program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Sifat kabur isi kebijakan dapat menyebabkan longgarnya pegangan dan pedoman bagi aktor pelaksana dan membuka kemungkinan timbulnya berbagai interpretasi mengenai isi kebijakan. Selain dari pada itu bila pelaksanaan mengenai isi kebijakan berlangsung lama, timbul kemungkinan terjadinya pergantian, pergeseran atau perubahan tujuan yang lebih besar.

2. Tingkat Informasi Aktor-Aktor yang Terlibat

Pelaksanaan suatu kebijakan memperlihatkan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung, mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik, karena dalam pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan apabila kekurangan informasi pada aktor objek kebijakan, misalnya masyarakat tidak mengetahui berbagai kemungkinan mengenai kewajiban yang harus mereka penuhi kepada pemerintah dan digunakan untuk apa atas kewajiban yang mereka penuhi. Kekurangan informasi mudah menimbulkan keaburan mengenai kebijakan bagi objek kebijakan dalam melaksanakan isi kebijakan. Jadi informasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa adanya informasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan informasi dalam melaksanakan kebijakan harus jelas.

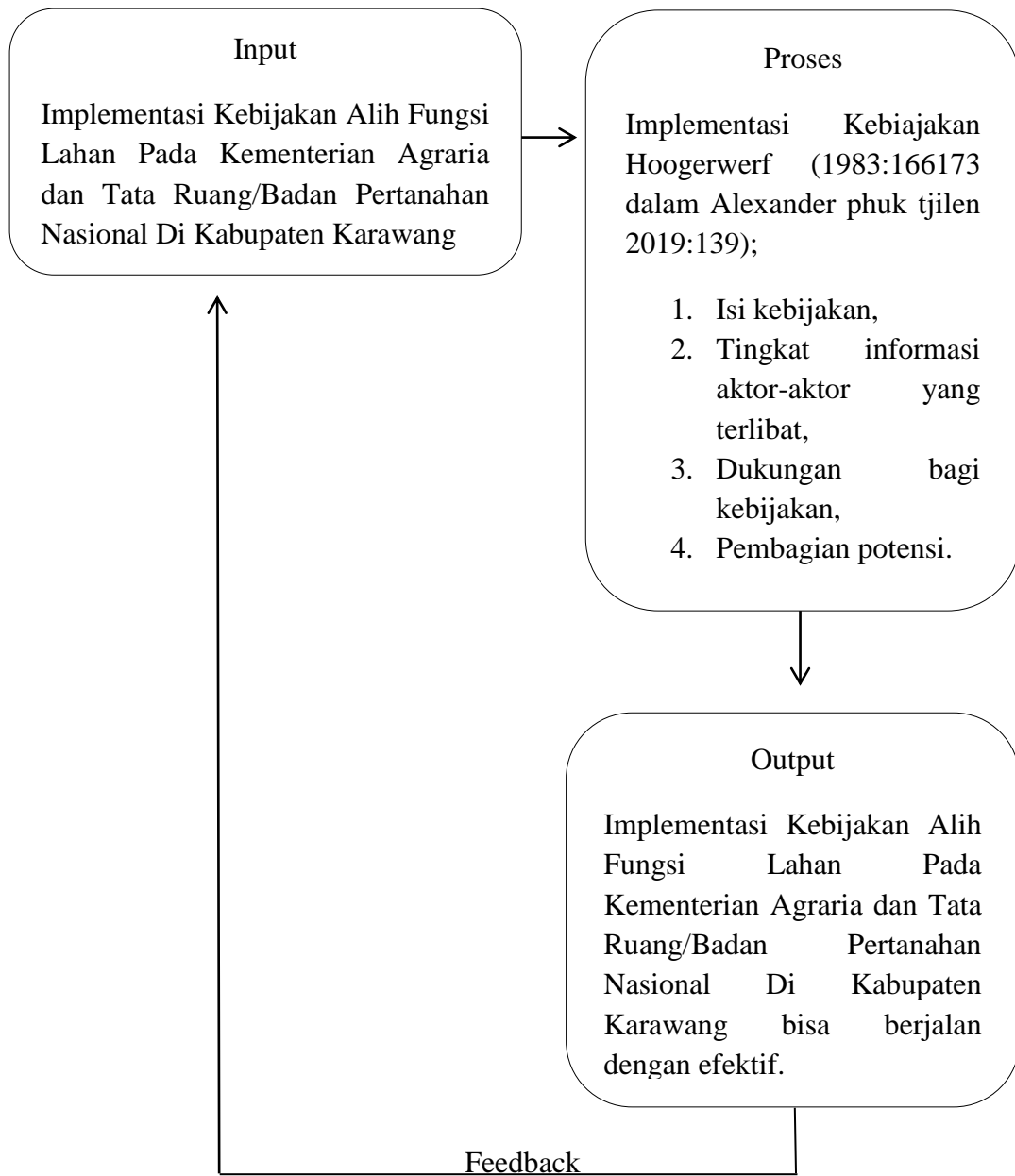
3. Dukungan bagi kebijakan

Pelaksanaan kebijakan akan sulit jika pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan. Dukungan ini tergantung dari berbagai hal, seperti kurangnya informasi, kurangnya imbalan jasa dan sebagainya. Jadi untuk berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan dukungan baik saran maupun biaya.

4. Pembagian potensi

Pembagian potensi yang tidak seimbang antara para aktor dapat pula menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Pembagian potensi ini antara lain diferensiasi tugas, delegasi wewenang atau tanggung jawab, koordinasi dan sebagainya. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan kebijakan maka diperlukan pembagian potensi yang seimbang di mana di dalamnya terdapat pembagian kemampuan yang dimiliki dan mempunyai tanggung jawab masing-masing di bidangnya, hal ini akan menimbulkan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan syarat implementasi kebijakan di atas, dapat dijadikan sebagai suatu kajian mengenai bagaimana pencapaian dari adanya implementasi kebijakan alih fungsi lahan pada kementerian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional di kabupaten karawang. Sehingga bisa memberikan jawaban apakah kebijakan alih fungsi lahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.3 Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena-fenomena permasalahan yang terjadi. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradig penelitian pada halaman sebelumnya. Maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan pada kementerian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional di kabupaten karawang akan bekerja dengan efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor yaitu isi kebijakan, tingkat informasi aktor-aktor yang terlibat, dukungan bagi kebijakan, pembagian potensi.
2. Terdapat adanya hambatan implementasi kebijakan alih fungsi lahan pada kementerian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional di kabupaten karawang.
3. Terdapat adanya upaya implementasi kebijakan alih fungsi lahan pada kementerian agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional di kabupaten karawang.